



## SOSIAL

### Penanganan Tak Tuntas, Kembali Turun ke Jalan

JOGIA, *Radar Jogja* - Banyak manusia silver di mana-mana yang mencari uang di perempatan jalan di wilayah Jogjakarta belum lama ini. Seperti menghilang begitu saja, kini justru menjamur pengamen yang menggunakan mik dan *sound system* di perempatan jalan.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIJ Noviar Rahmad menyebut, kegiatan itu melanggar Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. "Melanggar itu. Kami dari Satpol PP sering melakukan operasi, tapi sering muncul. Jadi akar permasalahannya yang harus dikupas," ujarnya kemarin (3/3) ■

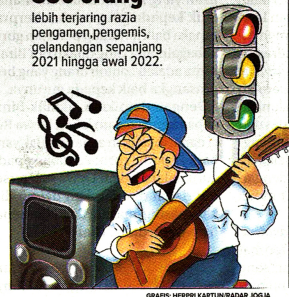
► Baca Penanganan... Hal 3

#### HABIS RAZIA KEMBALI KE JALAN

- Melanggar Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.
- Pengamen yang menggunakan mik dan *sound system* di perempatan jalan.
- Pengamen beragam, mulai dari masyarakat umum, mahasiswa, orang dari luar kota, bahkan ada orang Jogja.
- Mereka mengamen tersebar hampir di setiap simpang empat yang ada.

#### RAZIA 2021

- Setidaknya sudah **350 orang** lebih terjaring razia pengamen, pengemis, gelandangan sepanjang 2021 hingga awal 2022.



GRAFIK: HESPERI KARTUN/RADAR JOGIA

# Penanganan Tak Tuntas, Kembali Turun ke Jalan

*Sambungan dari hal 1*

Noviar mengungkap para pengamen itu beragam, mulai dari masyarakat umum, mahasiswa, orang dari luar kota, bahkan ada orang Jogja. Mereka mengamen tersebar hampir di setiap kesempatan ada. "Tapi kalau kita operasi, mereka menghilang. Mobil Pol PP udah kelihatan, mereka lari. Nanti muncul lagi," tegasnya.

Upaya yang dilakukan Satpol PP adalah dengan menertibkan dan mengarahkan para pengamen ke Dinas Sosial setempat untuk dibina. Biasanya mereka akan dibina selama tiga hari. "Dinsos akan melakukan pembinaan.

Tapi tiga hari setelah melakukan pembinaan, langsung dilepas lagi. Balik lagi ke jalan. Penanganannya tidak tuntas," ujarnya.

Kepala Dinas Sosial DIJ Endang Patmintersih mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Satpol PP sebagai pengawal Perda. Permasalahan pengemis dan gelandangan memang pelik. Penanganan terkadang tidak tuntas dan mereka kembali ke jalanan.

Dibutuhkan peran serta seluruh elemen masyarakat. "Kalau Dinsos sudah selalu sosialisasi penyuluhan, memberi arahan ke masyarakat, ke tokoh masyarakat. Kami sudah memberi informasi semua, dengan perda juga," jelasnya.

Setidaknya sudah 350 orang lebih terjaring razia sepanjang 2021 hingga awal 2022. Mereka dirujuk dan dibina di balai permasyarakatan. Endang menyebut hal itu sudah sesuai amanat peraturan daerah. Namun peran seluruh elemen masyarakat tetap dibutuhkan untuk mengurainya. Sebab yang dirazia dan dibina banyak yang kembali ke jalan.

"Itu jalan terus keluar masuk, kita sudah rujuk ke balai dan panti. Ada yang balik lagi, ada yang baru gitu. Kami terus berkoordinasi dengan Satpol PP yang mengawal Perda. Sudah berjalan sesuai amanat perda," tandasnya. **(cr4/laz/by)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 27 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005